# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.[[1]](#footnote-1) Perkembangan perekonomian dunia dan pola hubungan antar negara yang secara umum memperlihatkan jarak antar satu negara dengan negara lain yang menurun, membuat semakin terbukanya perdagangan antar negara dan meningkatnya akses pasar produk ke negara lain. Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN.[[2]](#footnote-2) Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya *ASEAN Second Informal Summit.*Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action*yang disepakati pada 1998.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN *(ASEAN Community)* dalam bidang Keamanan Politik *(ASEAN Political-Security Community),* Ekonomi *(ASEAN Economic Community)*, dan Sosial Budaya *(ASEAN Socio-Culture Community),* yang kemudian dikenal dengan Bali Concord II. Untuk pembentukan *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015, ASEAN telah menyepakati akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada cetak biru (*blueprint*) *AEC*.[[3]](#footnote-3)

*AEC* *Blueprint* ini memuat empat pilar utama, yang pertama ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas, yang kedua ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce yang ketiga ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negaranegara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam), dan yang terakhir ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.[[4]](#footnote-4)

Keempat pilar ini memiliki payung hukum yang telah disepakati berupa *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang mengatur tentang arus barang yang bebas, *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) yang mengatur arus jasa yang bebas, *ASEAN Comprehensive Agreement on Investment* (ACIA) yang mengatur arus investasi yang bebas, serta *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) yang mengatur tentang arus modal yang lebih bebas.

Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan negara penghasil karet alam terbesar kedua di dunia.[[5]](#footnote-5) Karet dikenal karena kualitas elastisnya, merupakan sebuah komoditi yang digunakan di banyak produk dan peralatan yang ada di seluruh dunia (mulai dari produk industri sampai rumah tangga). Sebagai salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati.

Sekitar 85% dari produksi karet Indonesia diekspor. Hampir setengah dari karet yang diekspor ini dikirimkan ke negara-negara Asia lain, diikuti oleh negara-negara di Amerika Utara dan Eropa.[[6]](#footnote-6) Lima negara yang paling banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat (AS), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Singapura, dan Brazil. Industri hilir karet Indonesia masih belum banyak dikembangkan. Saat ini, negara ini tergantung pada impor produk-produk karet olahan karena kurangnya fasilitas pengolahan-pengolahan domestik dan kurangnya industri manufaktur yang berkembang baik. Rendahnya konsumsi karet domestik menjadi penyebab mengapa Indonesia mengekspor sekitar 85% dari hasil produksi karetnya.[[7]](#footnote-7)

Indonesia membutuhkan investasi sektor manufaktur sekitar Rp1417,191 triliun per tahun untuk mencapai target pertumbuhan industri sebesar 8,95 persen pada 2014.[[8]](#footnote-8) Pada 2010, industri barang kayu dan hasil hutan lainnya ditargetkan bisa tumbuh sebesar 1,75 persen dan 3,7 persen pada 2014. Untuk itu, akan dibutuhkan dana investasi sebesar Rp4,139 triliun dan hingga 2014 kebutuhan investasinya mencapai Rp27,209 triliun. Industri kertas dan barang cetakan pada 2010 ditargetkan tumbuh 4,2 persen dengan kebutuhan investasi sebesar Rp4,776 triliun. Pada 2014, industri tersebut ditargetkan tumbuh sebesar 5,5 persen dengan kebutuhan investasi sebesar Rp33,286 triliun selama 2010-2014. Industri pupuk, kimia dan barang dari karet ditargetkan tumbuh sebesar 5 persen tahun depan dengan kebutuhan investai sebsar Rp12,843 triliun. Pada 2014 pertumbuhannya ditergetkan mencapai 8,3 persen jika kebutuhan investasi 2010-2014 sebesar Rp94,54 triliun terpenuhi. Arus investasi yang bebas sangat penting bagi Negara anggota ASEAN.

Menurut buku tentang informasi umum masyarakat ekonomi ASEAN yang diterbitkan Kementerian Perdagangan 2011, arus investasi asing lansung ke ASEAN tercatat relatif tinggi. Bahkan saat terjadi krisis global 2008, investasi asing langsung ke kawasan Asean mencapai 59,7 miliar dolar AS. Tahun 2010, total investasi langsung yang masuk ke ASEAN tercatat 75,8 miliar dollar AS, atau naik dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2009. Sebagian besar investasi langsung tersebut berasal dari sektor jasa. Tahun 2010, sumbangan sektor jasa mencapai 65,7 persen, sementara sektor manufaktur sebesar 28,1 persen.[[9]](#footnote-9) Sebaliknya, pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN tercatat masih kecil, hanya meningkat 13,4 persen menjadi 10,7 miliar dolar AS pada 2008. Padahal pasar terbesar ada di kawasan ASEAN, namun kerjasama intra-ASEAN belum optimal.

Menyadari pentingnya aliran dana investasi sebagai komponen pembangunan, Negara anggota ASEAN secara individu telah berusaha melakukan berbagai reformasi atas rezim investasinya yang kemudian dikoordinasi dalam wadah kerjasam regional. Oleh karenanya para pemimpin Negara Anggota ASEAN berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN serta meningkatkan daya saing untuk menarik investasi asing langsung ke kawasan ASEAN melalui payung hukum ACIA.[[10]](#footnote-10)

Selain memanfaatkan liberalisasi Investasi, pemerintah juga terus mengupayakan kebijakan-kebijakan dalam negri untuk menekan ekspor barang mentah, agar komoditas yang dimiliki Indonesia memiliki kualitas edit, dan juga padat karya. Pemerintah bisa melarang ekspor sumber daya alam (SDA) dalam bentuk mentah, seiring berlakunya Undang-Undang Perindustrian yang baru. Mulai Januari 2014, pemerintah melarang ekspor mineral mentah sesuai dengan UU Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada 2 Pasal yang menjadi sorotan dalam penerapan UU No. 4 Tahun 2009 ini, Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 170. Kedepan, larangan ekspor bisa diperluas ke komoditas lain di luar mineral.[[11]](#footnote-11)

Pemerintah melakukan pembatasan atau pelarangan ekspor agar bisa terpenuhi kebutuhan dalam negeri. RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) diharapkan bisa mengatasi persoalan yang terus muncul akibat pertumbuhan industri, yakni lonjakan impor bahan baku dan bahan penolong. Contohnya saja selama ini Indonesia mengekspor bauksit kemudian mengimpornya kembali dalam bentuk alumina yang digunakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk memproduksi aluminium batangan, PT Krakatu Steel Tbk (KS) masih mengimpor bahan baku besi dan baja.Industri petrokimia juga masih tergantung pada bahan baku impor. Bahkan, per September 2013, impor petrokimia menguras devisa US$ 16 miliar.[[12]](#footnote-12) sehingga hal ini menyebabkan *high cost*. Meskipun pada saat pembuatan penelitian ini perluasan Undang-Undang pelarangan ekspor untuk komoditas diluar mineral masih belum terealisasikan, akan tetapi hal itu sudah dibahas oleh mentri perindustian MS Hidayat periode 2009-2014, sebagai Hal itu untuk mendukung Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Ini sesuai dengan amanat UU Perindustrian.[[13]](#footnote-13)

Perdagangan bebas tentunya juga memberikan sejumlah manfaat, seperti terbukanya akses pasar barang dan jasa, terpenuhinya bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, peningkatan investasi yang akan mempengaruhi struktur industri, mendorong adanya peningkatan kapasitas *(capacity building)* untuk peningkatan daya saing industri domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, perdagangan bebas tidak akan dapat memberikan manfaat yang besar jika daya saing industri dalam negeri jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri luar negeri[[14]](#footnote-14).

Dalam era MEA ditetapkan bahwa ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Tujuh diantaranya adalah sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif. Sementara sisanya adalah lima sektor jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi atau e-ASEAN.[[15]](#footnote-15) Dengan terintegrasinya sektor-sektor tersebut tentunya akan membawa implikasi terutama terhadap pergerakan barang dan jasa antar negara ASEAN yang semakin bebas. Di samping itu, integrasi tersebut juga diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja antar sesama negara anggota. Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi yang strategis harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC (ASEAN Economic Community) di tahun 2016.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik untuk Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal itu akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini, competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia. Ini, tentu saja, akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Bagi Indonesia implementasi MEA merupakan salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengambil manfaat yang sebesar–besarnya dari globalisasi ekonomi. Aspirasi multilateral, terutama yang berkaitan dengan integrasi ekonomi kawasan, seperti MEA dan lainnya, selain memberikan kesempatan atau peluang pasar yang lebih luas, juga mengandung sejumlah tantangan atau permasalahan yang kompleks. Dalam hal ini, pemberlakuan MEA selain meningkatkan perdagangan intra regional ASEAN, juga akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan investasi, produksi, dan perdagangan di kawasan. Dengan perdagangan yang akan semakin meningkat, surplus atau defisit perdagangan yang terjadi bagi suatu negara cenderung akan semakin dinamis dan multidimensi.

Melalui ACIA, baik investor ASEAN dan investor asing berbasis ASEAN dapat mengambil manfaat dari liberalisasi investasi yang lebih besar dan proteksi investasi yang semakin membaik. Hal menarik yang patut dipertanyakan adalah bagaimana aturan main arus investasi yang bebas dalam meningkatkan perkembangan industri manufaktur karet Indonesia sehingga para Negara Anggota ASEAN khususnya Indonesia dapat mengambil manfaat dari adnya masyarakat ekonomi ASEAN.

## Identifikasi Masalah

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* dan industri karet Indonesia?
2. Bagaimana upaya Indonesia dalam mengembangkan Industri karet karet dalam negeri?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan *ASEAN comprehensive Investment Agreement (ACIA)* terhadap pembangunan industri karet Indonesia ?

### Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang dikemukakan, sehingga diperlukan pembatasan masalah dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari tofik pembahasan. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini pada kajian kebijakan *ASEAN comprehensive Investment Agreement (ACIA)* serta korelasinya terhadap pembangunan industri karet Indonesia.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan diatas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka diperlukan perumusan masalah yang menunjukan Bagaimana implementasi kebijakan *ASEAN comprehensive Investment Agreement (ACIA)* serta korelasinya terhadap pembangunan industri karet Indonesia.

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dibawah ini merupakan tujuan dan kegunaan dalam melakukan penelitian, adalah sebagai berikut:

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kebijakan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* dan industri karet Indonesia.
2. Mengetahui upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3. Mengetahui pengaruh kebijakan *ASEAN comprehensive Investment Agreement (ACIA)* terhadap pembangunan industri karet Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

Dibawah ini merupakan kegunaan dari dilakukannya penelitian skripsi, yang mana kegunaannya terdiri atas kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis.

#### Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya di bidang ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai teori Ekonomi Politik Internasional khususnya kajian Masyarakat Ekonomi ASEAN dan implikasinya terhadap pembagunan industri karet indonesia, juga dapat menjadi referensi, sumber informasi ilmiah dan bahan kajian lebih lanjut dalam kajian hubungan internasional bagi peneliti yang memiliki objek kajian yang sama.

#### Secara Praktis

1. Sebagai sarana untuk membangun kembali pemahaman teori-teori Hubungan Internasional yang pernah dipelajari oleh penulis.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menempuh program studi S1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Pasundan.
1. Arya Baskoro, “Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN” Kompasiana (Online), Jakarta, 3 April 2017, dalam <https://www.kompasiana.com/crmsindonesia/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi-asean_58e1d239ed9273b744d68196> diakses pada 15 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. G.T. Suroso, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia”, Publikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan (Online), Jakarta, Kamis, 12 Februari 2015, dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia> diakses pada 15 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. *kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*, (Jakarta : Pusat Kebijakan Luar Negri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, 2011), hal. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Cetak Biru Komunitas ASEAN (*Asean Economic Community Blueprint)*”*,* Jakarta, 2013, hal 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. “10 Negara Penghasil Karet Alam Terbesar di Dunia”, *Libgar* (online), Indonesia, 14 Desember 2017, dalam <http://www.libgar.com/2017/12/10-negara-penghasil-karet-alam-terbesar-di-dunia.html> diakses pada 15 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. “Karet (alam)”, *Indonesia-Investments,* Jakarta, 16 Februari 2016, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185>? Diakses pada 19 Jnauari 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Indonesia Butuh Rp147 Triliun Investasi Sektor Manufaktur” *Berita Industri Kemenperin* dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1394/Indonesia-Butuh-Rp147-Triliun-Investasi-Sektor-Manufaktur> diakses 16 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Liberalisasi Investasi Tahun 2012” *Kompas,* Manado, 15 Agustus 2011, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/15/02224425/Liberalisasi.Investasi.Tahun.2012> diakses pada 16 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lusda Astri, “Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum Comprehensive Investment Agreement (Acia) Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015” *academia.edu* (online), dalam <https://www.academia.edu/9886725/KESIAPAN_INDONESIA_DALAM_RANGKA_LIBERALISASI_INVESTASI_DALAM_KERANGKA_HUKUM_COMPREHENSIVE_INVESTMENT_AGREEMENT_ACIA_MENUJU_MASYARAKAT_EKONOMI_ASEAN_MEA_2015> diakses 16 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Larangan Ekspor Bahan Mentah akan Diperluas” *Berita Industri kemenperin.go,* dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8245/Larangan-Ekspor-Bahan-Mentah-akan-Diperluas> diakses pada 16 Jnuari 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid., hal.2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dyah Ratna Meta Novia , “Pemerintah Tetapkan 12 Sektor Prioritas Hadapi MEA”, *Republika* (online), Indonesia, 19 Februari 2018, dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/10/12/nw3398361-pemerintah-tetapkan-12-sektor-prioritas-hadapi-mea> diakses pada 19 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-15)